KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
c. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERTAMA	:	Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang meliputi: a. Informasi Publik yang Diumumkan secara Berkala; b. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat; dan c. Informasi Publik yang Diumumkan secara Serta-Merta.
KEDUA	:	Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
KEEMPAT	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia,

Haryo Limanseto
NIP 19730128 199301 1 001

Lampiran I
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

I. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2021	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Jakarta, 2022	*Softcopy*	5 tahun
2.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2022	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Jakarta, 2023	*Softcopy*	5 tahun
3.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2023	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
4.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2024	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun

5.	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2025	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
6.	Materi Sosialisasi Sistem Informasi P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun
7.	Dokumentasi Evaluasi Kinerja Championships TP2DD Tahun 2025	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun
8.	Laporan Asesmen Implementasi ETPD Semester I 2024	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
9.	Laporan Asesmen Implementasi ETPD Semester II 2024	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun
10.	Laporan Kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
11.	Laporan Kinerja Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan)	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun

II. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Laporan Pasar Harian di situs Kemenko Perekonomian (ekon.go.id)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
2.	Presentation Book IRU di situs Kemenko Perekonomian (ekon.go.id)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
3.	Perkembangan Ekonomi Terkini	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
4.	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development) Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
5.	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2024 Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun

6.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2024 Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
7.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2025 Pengesahan Indo-Pacific Economy Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran Terkait Ekonomi Bersih)	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jakarta, 2024	*Softcopy*	5 tahun
8.	Memorandum Saling Pengertian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun
9.	Kerangka Kerja Sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand (IMT) dalam Prosedur Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina Lintas Batas di Segitiga Pertumbuhan	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Kuala Lumpur, 2025	*Softcopy*	5 tahun
10.	Memorandum Saling Pengertian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok tentang Proyek Kerja Sama Kawasan Kembar Dua Negara	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun
11.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Republik Korea tentang Implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Singapura, 2024	*Softcopy*	5 tahun

12.	*Framework for Negotiating ASEAN Digital Economy Framework Agreement*	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Jakarta, 2023	*Softcopy*	5 tahun
13.	*ASEAN Plus Three Leaders' Statement on Developing of Electric Vehicle Ecosystem*	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Jakarta, 2023	*Softcopy*	5 tahun
14.	*ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises*	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Jakarta, 2023	*Softcopy*	5 tahun
15.	*ASEAN Blue Economy Framework*	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Jakarta, 2023	*Softcopy*	5 tahun
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Asisten Deputi Investasi dan Hilirisasi	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun

III. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Laporan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa dan Sumatera	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
2.	Informasi Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
3.	Data perputaran waktu (*turnaround time*) Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun

4.	Buku Putih Strategi Ekonomi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Jakarta, 2025	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
5.	Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun

IV. DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Resume capaian target lifting minyak dan gas bumi	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
2.	Resume capaian penyaluran BBM bersubsidi	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
3.	Resume realisasi produksi batubara	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
4.	Resume jumlah pasokan mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di dalam negeri	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
5.	Resume capaian produksi listrik energi terbarukan	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
6.	Resume capaian konsumsi listrik per kapita	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
7.	Resume capaian target konsumsi biofuel	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun

8.	Resume kajian pengembangan gasifikasi batubara	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun

V. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Laporan Semester Proyek Strategis Nasional (PSN)	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	Jakarta, setiap semester	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
2.	Infografis dan Informasi Proyek Strategis Nasional (PSN)	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	Jakarta, setiap ada informasi baru	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
3.	Ringkasan Laporan Perkembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT INSIGHT) Semester 1 Tahun 2025	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
4.	Ringkasan Laporan Perkembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT INSIGHT) Semester 2 Tahun 2025	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
5.	Ringkasan Informasi Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Jakarta, setiap triwulan	*Softcopy*	5 tahun

6.	Ringkasan Laporan Perkembangan Sektor Pariwisata Indonesia	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Jakarta, 2025	*Softcopy*	5 tahun

VI. INSPEKTORAT

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Informasi Struktur Organisasi	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
2.	Informasi Gambaran Umum Satuan Kerja	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
3.	Informasi Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
4.	Informasi Profil Singkat Pejabat Struktural	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
5.	Rencana Kerja	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
6.	Perjanjian Kinerja	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	6 tahun
7.	Informasi tentang Kinerja Berupa Laporan Kinerja Triwulanan	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
8.	Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
9.	Statistik Pengaduan melalui Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI) atau SP4N-LAPOR	Inspektorat	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat	Jakarta, 2026	*Softcopy*	3 tahun

VII. BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2023	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Jakarta, 2024	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
2.	Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Jakarta, 2024	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
3.	Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2025	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Kelompok Kerja Manajemen Keuangan	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun
4.	Statistik data kepegawaian (rekapitulasi jumlah pegawai)	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Jakarta, 2025	*Softfile*	2 tahun dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan
5.	Pengumuman Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara terbuka	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Jakarta, 2025	*Softfile*	2 tahun dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan
6.	Informasi Layanan Pendaftaran Magang Mahasiswa	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Jakarta, 2025	*Softfile*	2 tahun dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan
7.	LHKPN Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah diumumkan di website KPK	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Jakarta, 2025	*Softfile*	2 tahun dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan
8.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Bagian Pengadaan	Bagian Pengadaan	Jakarta, 2025	*Softcopy* dan *Hardcopy*	5 tahun

9.	Persentase Pengisian LHKASN	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Tim Kerja/Kelompok Kerja Manajemen SDM	Jakarta, 2025	*Softfile*	2 tahun dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan

VIII. BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Perjanjian Kinerja	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Fasilitasi Penguatan Kinerja	Jakarta, 2026	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
2.	LAKIP	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Fasilitasi Penguatan Kinerja	Jakarta, 2026	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
3.	Rencana Kerja (Renja)	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
4.	DIPA	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
5.	Rencana Strategis (Renstra)	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Program dan Anggaran	Jakarta, 2025	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
6.	Perjanjian Kinerja	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Kelompok Substansi Fasilitasi Penguatan Kinerja	Jakarta, 2026	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
7.	Daftar Layanan TIK	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pokja Data dan Sistem Informasi	Jakarta, 2025	*Softcopy & Hardcopy*	5 tahun
8.	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pokja Data dan Sistem Informasi	Jakarta, 2024	Salinan digital PDF	5 tahun
9.	Kebijakan & Regulasi Internal Penggunaan TIK	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pokja Data dan Sistem Informasi	Jakarta, 2025	Salinan digital PDF	5 tahun

IX. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Reformasi Birokrasi	Bagian Reformasi Birokrasi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	2 tahun
2.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	1 tahun
3.	Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenko Perekonomian	Bagian Hukum I dan Bagian Hukum II	Bagian Hukum I dan Bagian Hukum II	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	2 tahun
4.	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Reformasi Birokrasi	Bagian Reformasi Birokrasi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	2 tahun
5.	Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenko Perekonomian	Bagian Reformasi Birokrasi	Bagian Reformasi Birokrasi	Jakarta, 2026	*Softcopy* dan *Hardcopy*	2 tahun

X. BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Siaran Pers, Berita, dan Buletin yang sudah dipublikasikan di situs Kemenko Perekonomian (ekon.go.id)	Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun

2.	Foto Kegiatan Menko Perekonomian dan Eselon I yang sudah dipublikasikan di situs dan sosmed Kemenko Perekonomian	Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun
3.	Video Kegiatan Menko Perekonomian dan Eselon I yang sudah dipublikasikan di situs dan sosmed Kemenko Perekonomian	Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Jakarta, 2026	*Softcopy*	5 tahun

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia,

Haryo Limanseto
NIP 19730128 199301 1 001